

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti komitmen Indonesia untuk menerapkan kendaraan listrik (EV), khususnya mobil dan sepeda motor listrik, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Komitmen ini sejalan dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022, di mana Indonesia menekankan pentingnya transisi energi berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon, yang kemudian disepakati dengan Bali Compact 2022. Pemerintah Indonesia kemudian telah memperkenalkan beberapa kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Presiden No. 55/2019 dan berbagai insentif fiskal, untuk mendorong adopsi dan produksi EV. Upaya ini merupakan bagian dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia berdasarkan Paris Agreement, yang bertujuan untuk mengurangi emisi sebesar 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Setelah Bali Compact 2022, Indonesia menunjukkan perkembangan dalam komitmennya bertransisi menuju energi yang berkelanjutan. Insentif fiskal dan peraturan pemerintah yang mendorong perkembangan perusahaan kendaraan listrik dengan sehat berperan penting dalam perkembangan ini. Sepeda motor, sebagai kendaraan yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia oleh karena kemudahannya, secara perlahan beralih dari bahan bakar minyak menjadi motor listrik. Hal ini merupakan keberhasilan dari adanya perluasan infrastruktur pengisian daya dan pertukaran baterai dan tercatat pada tahun 2024 bahwa jumlah motor listrik Indonesia mencapai 74.988 unit. Mobil listrik juga mengalami peningkatan dalam penjualan secara stabil, yang dibantu oleh pengecualian pajak barang mewah untuk kendaraan listrik dan hadirnya model-model kendaraan listrik baru di pasar.

Penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan EV, termasuk biaya awal yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang terbatas, dan skeptisisme konsumen. Meskipun ada kendala-kendala ini, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan ekosistem

Fitriyani, 2025

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MOBIL DAN MOTOR LISTRIK PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENDUKUNG DEKLARASI KOMITMEN LINGKUNGAN PRESIDENSI G20 INDONESIA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kendaraan listriknya, khususnya dalam memanfaatkan cadangan nikelnya yang besar untuk produksi baterai dan menarik investasi asing dari produsen mobil global seperti Hyundai dan LG Chem. Upaya pemerintah untuk memperluas infrastruktur pengisian daya, memberikan subsidi, dan mempromosikan produksi komponen kendaraan listrik dalam negeri merupakan langkah-langkah penting untuk mencapai target ambisiusnya.

Namun, penerapan kebijakan kendaraan listrik di Indonesia masih dalam tahap awal, dan laju adopsi masih lambat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi emisi melalui adopsi kendaraan listrik, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada upaya yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan kesadaran publik yang lebih besar. Kepresidenan G20 menyediakan platform bagi Indonesia untuk mengadvokasi kerja sama global dalam pengembangan kendaraan listrik, tetapi tantangan domestik harus diatasi untuk memastikan penerapan kebijakan ini secara efektif.

## **VI. 2 Saran**

Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memprioritaskan perluasan infrastruktur pengisian daya, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, untuk mengatasi "kecemasan jarak tempuh" dan mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas. Kemitraan publik-swasta dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya. Berinvestasi dalam teknologi pengisian daya cepat untuk mengurangi waktu pengisian daya dan membuat kendaraan listrik lebih nyaman bagi konsumen juga penting.

Kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi publik mengenai kendaraan listrik. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye nasional untuk mengedukasi konsumen tentang manfaat kendaraan listrik, termasuk keuntungan lingkungan, penghematan biaya, dan insentif pemerintah. Menyoroti manfaat ekonomi jangka panjang kendaraan listrik dapat membantu mengubah persepsi publik.

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan insentif keuangan. Melalui subsidi dan keringanan pajak, pemerintah dapat melanjutkan dan

memperluas subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, khususnya bagi konsumen berpenghasilan rendah dan menengah. Pertimbangkan untuk menawarkan insentif tambahan, seperti pengurangan tarif listrik untuk pengisian daya kendaraan listrik dan penurunan suku bunga untuk pinjaman kendaraan listrik. Memberikan insentif lebih lanjut bagi produsen lokal untuk memproduksi komponen kendaraan listrik, seperti baterai dan motor, juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan menurunkan biaya produksi.

Keempat, dalam semangat kolaborasi, pemerintah Indonesia dapat memperkuat kemitraan dengan organisasi internasional dan negara G20 lainnya untuk memfasilitasi transfer teknologi, khususnya dalam produksi baterai dan integrasi energi terbarukan. Pemerintah Indonesia juga dapat terus menarik investasi asing langsung di sektor kendaraan listrik dengan menawarkan kondisi investasi yang menguntungkan dan memamerkan potensi Indonesia sebagai pusat regional untuk produksi kendaraan listrik.